

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengapa kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran di masa pemerintahan Barack Obama bersikap lunak, hal ini didasarkan 2 hal, yakni, pertama, Barack Obama ingin menjaga keuntungan politik dan keamanan di kawasan timur tengah. Kedua, Barack Obama ingin menjaga keuntungan ekonomi dan sekutunya di Timur Tengah.

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Iran dimulai pada sekitar pertengahan akhir tahun 1800-an. Sebelum terjadinya revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, hubungan AS-Iran dan bahkan Iran dengan Inggris serta beberapa negara Barat lainnya merupakan hubungan yang sangat dekat, bahkan bisa dikatakan Iran merupakan “boneka” kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Pada saat itu Iran merupakan negara yang kuat secara ekonomi, politik, dan militer yang semuanya akibat dukungan AS dan negara-negara Barat.

Namun, sejak revolusi para mullah dibawah pimpinan Ayatullah Khomeini pada tahun 1979 yang menumbangkan sekutu Amerika, Reza Shah Pahlevi, Iran telah menjadi target Amerika. Pendudukan Kedutaan Amerika di Teheran oleh para aktivis mahasiswa pada 4 November 1979 yang diikuti penyanderaan 52 orang diplomatnya selama 444 hari, merupakan peristiwa yang memalukan bagi Amerika dan menjadi alasan untuk memutuskan hubungan diplomatik pada 7 April 1980. Selanjutnya, dengan dalih HAM dan demokrasi Amerika menjatuhkan berbagai embargo, operasi intelijen dan operasi militer.

Kebijakan nuklir Iran dalam beberapa tahun terakhir adalah salah satu pemicu tekanan Barat melalui Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Republik Islam tersebut. Mereka menilai bahwa tujuan Iran untuk mengadakan pengayaan uranium tidak lain adalah demi kepentingan militernya agar mampu hadir sebagai kekuatan dominan di

kawasan, menandingi salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat, Israel. Iran sendiri secara resmi berulang kali menyatakan sanggahannya terhadap tuduhan itu dan mengatakan bahwa program pengayaan uranium mereka betul-betul demi tujuan damai, yakni membangun pembangkit listrik tenaga nuklir untuk membantu memenuhi kebutuhan energi nasionalnya di masa depan.

Pada era sebelum terjadi Perang Dunia I yakni pada 1916, Amerika Serikat memperlunak politik luar negerinya yang bersifat ekspansionis. Bahkan ketika Perang Dunia I terjadi AS menyatakan tidak ingin terlibat. Akan tetapi, secara perlahan ketika militer angkatan laut AS diganggu oleh Jerman, perilaku agresor militer AS mulai terlihat kembali. Setelah kapal dagang milik AS ditenggelamkan oleh Jerman pada 1917, AS menyatakan perang terbuka terhadap Jerman pada Perang Dunia I (Hendrajit et al. 2010, h. 106). Setelah Perang Dunia I, AS muncul sebagai pemenang dan mulai terlibat dalam upaya perdamaian dunia. Misalnya, AS dibawah Presiden Woodrow Wilson memelopori terbentuknya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) pada tanggal 10 Januari 1920 dengan tujuan untuk terwujudnya perdamaian dunia dan rekonstruksi kesejahteraan global pasca Perang Dunia I (Hendrajit et al. 2010, h. 106). Akan tetapi, keberadaan LBB ini tidak bertahan lama, dikarenakan dasar politik luar negeri AS yang ekspansionis dan sistem internasional yang anarkis sehingga menyebabkan meletusnya kemelut Perang Dunia II pada 1939.

Memasuki Perang Dunia II, Amerika Serikat semakin menjadi negara yang diperhitungkan di dunia (Hendrajit 2010, h. 106). AS yang terlibat langsung dalam Perang Dunia II menganggap bahwa keterlibatannya adalah karena AS sebagai polisi dunia berhak untuk turut serta menjaga dan membantu para sekutunya yakni Inggris, Polandia dan Perancis dari serangan militer Jerman dan Italia. Terlebih pelabuhan militer AS Pearl Harbor ikut diserang oleh pasukan Jepang. Keadaan ini semakin memperkeruh keadaan internasional pada waktu terjadinya Perang Dunia II. Kemudian, kelompok sekutu yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia II yang dipimpin oleh

AS melebarkan dominasinya untuk melanjutkan kiprahnya di dunia. AS bersama negara-negara sekutu lainnya yakni Inggris, Perancis dan Polandia kembali membawa dunia ke tatanan perdamaian.

Kebijakan politik Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya setelah Perang Dunia II, merupakan sebuah fenomena politik baru dalam politik global yakni kerjasama dan intergrasi negara dalam suatu kawasan dalam skala kontinental. Globalisasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan besar, terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan politik dan otonomi negara. Saat ini, telah terjadi perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern (David Held. 2000, *Regulation Globalization, international sociology*, 394).

Di bawah pemerintahan Bush, strategi yang diterapkan adalah diplomasi koersif. Diplomasi koersif adalah negosiasi yang memerlukan sanksi agar aktor yang dikehendaki mau mengerjakan apa yang diperintahkan negara 'coercer'. Perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan diplomasi koersif adalah stick and carrot yaitu, apabila negara yang dituju menurut maka mereka boleh mendapatkan wortel. Namun jika sebaliknya, maka negara tersebut akan dipukul dengan tongkat. Strategi seperti inilah yang digunakan oleh Bush dalam mencoba menekan Iran. Akan tetapi, sebelum jenis diplomasi ini diterapkan, pemerintahan Bush memulai langkah dengan mengkonstruksi pola pikir dunia internasional akan bahaya yang dibawa oleh Iran. Konstruksi ini terutama dituju untuk negara-negara besar Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Jerman. Inilah yang benar-benar terjadi bahwa AS berhasil meyakinkan ketiga negara tersebut. Pada bulan Oktober 2003, negara besar Uni Eropa berhasil membuat Iran setuju untuk mengikuti protokol IAEA (International Atomic Energy Agency) agar menunda pengayaan (Hadley, 2014).

Di masa pemerintahan Barack Obama terjadi perbedaan sikap dan kebijakan dari pemerintahan Bush yang didominasi oleh *hard power*. Pasalnya, Obama berkaca dari pengalaman presiden sebelumnya yakni tak lain adalah Bush yang dinilai gagal dalam membawa Iran ke meja perundingan untuk berdiplomasi. Walaupun sempat menunda pengayaan uranium pada tahun 2003, Iran kembali melanjutkan proyeknya pada tahun 2006. Ini menjadi pertimbangan pemerintahan Obama, sehingga AS memutuskan untuk fokus pada strategi *soft power* terhadap Iran. Obama lebih memilih menggunakan jalur yakni, perundingan, berdasarkan pertimbangan untung dan rugi, ini merupakan taktik dimana AS di bawah kepemimpinan Barack Obama memilih pendekatan-pendekatan diplomatis guna mengatasi persoalan Amerika dalam menjalin hubungan yang lebih baik dengan Iran, serta memulihkan citra AS dari kepemimpinan Bush sebelumnya. Dari pendekatan militeristik ke pendekatan yang lunak.

Bahkan Obama membuat kebijakan program yang bernama *Virtual Embassy* agar memberikan kesempatan kepada generasi muda Iran untuk belajar di AS. Hal ini disampaikan dan dipastikan oleh sekretaris negara, Clinton dalam wawancaranya dengan Voice Of America (VOA). Dari sini kita dapat melihat bahwa walaupun sebelumnya Iran dianggap sebagai musuh, malah sebaliknya digandeng oleh AS di bawah pemerintahan Obama secara internal. Maksudnya, AS berusaha untuk memenangkan hati rakyat Iran, dan secara tidak langsung mengkonstruksi pola pikir yang positif terhadap AS melalui pendidikan. Usaha ini sangat penting sebagai langkah-langkah dalam mencapai kepentingan nasional negara adidaya ini.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran di masa pemerintahan Barack Obama melalui cara-cara yang bersifat *soft power*, dari sini kita juga patut mengetahui latar belakang mengapa Obama mengambil sikap yang lunak terhadap program nuklir Iran dikarenakan AS ingin menjaga keuntungan politik, keamanan di Kawasan

Timur Tengah dan ingin menjaga keuntungan ekonomi dan sekutunya di Timur Tengah.

Kepentingan Amerika Serikat terhadap minyak di Timur Tengah nampaknya selalu menjadi prioritas utama dalam setiap politik luar negerinya. Sudah menjadi aksioma kebijakan luar negeri AS bahwa negara adidaya itu harus mengontrol sumber energi Timteng kendati minyak Timteng sendiri hanya menyumbang 10 persen dari impor minyak AS. Kebijakan AS terhadap Timteng akan tetap sama sekalipun AS tidak menggunakan minyak dari Timteng. Dengan menguasai Timteng yang mempunyai cadangan minyak terbesar didunia, AS sekaligus mempunyai kekuatan veto dan bisa mengendalikan para pesaing industrinya dalam menguasai perekonomian dunia. Selama ini Amerika menempuh segala cara untuk bisa mempertahankan pengaruh dan kepentingannya, terutama menyangkut minyak di timur tengah.

Setiap perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, setiap intervensi militer yang dilakukan AS, dan setiap operasi gelap badan intelijen AS (CIA) di Timur Tengah tujuannya hanya satu, yaitu untuk menguasai jalur produksi dan perdagangan minyak. Dalam model aktor rasional politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, menekankan bagaimana suatu negara hagemoni akan berperilaku sedemikian rupa untuk menjaga stabilitas kawasan. Hal ini dilakukan karena

mereka merasa bahwa sebagai negara dengan pengaruh besar, maka akan ada kewajiban yang sama besar pula untuk dikerjakan. Inilah salah satu landasan yang menjelaskan mengapa AS di masa pemerintahan Barack Obama ingin bernegosiasi dengan Iran agar menurunkan tingkat pengayaan nuklirnya.